

OTORITAS KEAGAMAAN DI KOMUNITAS MUSLIM PEDESAAN: PENDIDIKAN AL-QUR'AN YANG TERDESENTRALISASI DI INDONESIA

Siti Fahimah¹, Lujeng Luthfiah²

^{1,2}IAI Tarbiyatut Tholabah Lamongan Jawa Timur
sitifahimah@iai-tabah.ac.id¹, luthfiahlutfin@gmail.com²

Abstract: This article examines the dynamics of religious authority within decentralized non-formal Qur'anic education in rural Muslim communities in Indonesia. The central problem addressed concerns how community-based autonomy in Qur'anic educational institutions shapes the legitimacy of kyai and ustaz as local religious authorities while simultaneously producing institutional variation and fragmentation. The study aims to analyze how religious authority operates in the management of non-formal Qur'anic education and to explore the social implications of decentralization for institutional governance and quality. Employing a qualitative case study design conducted in a rural Muslim village in East Java, the research draws on participant observation, in-depth interviews with kyai, ustaz, educational administrators, parents, and village officials, as well as institutional document analysis. Data were analyzed interactively to identify patterns of authority relations, forms of social legitimacy, and variations in institutional practices. The findings reveal that non-formal Qur'anic education functions as a community-based religious institution that reinforces the authority of kyai through networks of trust, scholarly experience, and social recognition. At the same time, high levels of decentralization generate uneven educational standards, variations in quality, and weak inter-institutional coordination. The study concludes that religious authority in rural Muslim communities operates relationally and pragmatically through educational institutions, yet requires community-based coordination mechanisms to balance local autonomy with institutional quality. It recommends strengthening communication forums among Qur'anic educational institutions while preserving the autonomy that characterizes community-based religious life.

Keywords: Religious authority; Qur'anic education; Rural Muslim communities; Decentralization; Indonesia.

Abstrak: Artikel ini mengkaji dinamika otoritas keagamaan dalam pendidikan Al-Qur'an nonformal yang berkembang secara terdesentralisasi di komunitas Muslim pedesaan Indonesia. Masalah utama yang diteliti adalah bagaimana kemandirian lembaga pendidikan Al-Qur'an berbasis komunitas membentuk

pola legitimasi kyai dan ustaz sebagai otoritas religius lokal, sekaligus menghasilkan variasi dan fragmentasi kelembagaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme kerja otoritas keagamaan dalam pengelolaan pendidikan Al-Qur'an serta menjelaskan implikasi sosial dari desentralisasi terhadap tata kelola dan mutu lembaga. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus di sebuah desa Muslim pedesaan di Jawa Timur. Data diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan kyai, ustaz, pengelola lembaga, wali santri, dan perangkat desa, serta analisis dokumen kelembagaan. Analisis dilakukan secara interaktif untuk mengidentifikasi pola relasi otoritas, bentuk legitimasi sosial, dan variasi praktik kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Al-Qur'an nonformal berfungsi sebagai institusi keagamaan berbasis komunitas yang memperkuat posisi kyai sebagai otoritas melalui relasi kepercayaan, pengalaman keilmuan, dan pengakuan sosial. Namun, tingkat desentralisasi yang tinggi juga melahirkan perbedaan standar pembelajaran, variasi mutu, serta lemahnya koordinasi antarlembaga. Kesimpulannya, otoritas keagamaan di komunitas Muslim pedesaan bekerja secara relasional dan pragmatis melalui institusi pendidikan, tetapi memerlukan mekanisme koordinasi berbasis komunitas untuk menjaga keseimbangan antara otonomi lokal dan kualitas kelembagaan. Penelitian ini menyarankan penguatan forum komunikasi antar-lembaga pendidikan Al-Qur'an tanpa menghilangkan karakter otonomi yang menjadi kekuatan komunitas.

Kata kunci: Otoritas keagamaan; Pendidikan Al-Qur'an nonformal; Komunitas Muslim pedesaan; Desentralisasi; Indonesia.

PENDAHULUAN

Islam dalam komunitas Muslim pedesaan di Indonesia tidak semata hadir sebagai sistem doktrinal, tetapi sebagai praktik sosial yang membentuk struktur relasi, kepemimpinan, dan institusi lokal.¹ Dalam konteks tersebut, otoritas keagamaan tidak hanya diproduksi melalui lembaga formal negara, melainkan melalui pengakuan sosial dan jaringan keilmuan yang hidup di tingkat komunitas.² Studi tentang organisasi Islam dan tata kelola demokratis di Indonesia juga menunjukkan bahwa legitimasi religius sering kali beroperasi melalui mekanisme sosial yang bersifat non-birokratis.³ Dengan demikian, Islam di pedesaan lebih tepat dipahami sebagai arena relasional di mana otoritas

¹ M C Ricklefs, "Rediscovering Islam in Javanese History" 3, no. August 2014 (2023), <https://doi.org/10.1163/9789004678897>.

² Robert W. Hefner, *Islam and Citizenship in Indonesia Democracy and the Quest for an Inclusive Public Ethics*, 1st Editio (London: Routledge, 2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781032629155>.

³ Saiful Mujani and R. William Liddle, "Muslim Indonesia's Secular Democracy," *Asian Survey* Vol. 49, N (2009): 575–90, <https://www.jstor.org/stable/10.1525/as.2009.49.4.575>.

dibangun melalui praktik keseharian dan interaksi komunitas, bukan semata melalui regulasi formal.⁴

Dalam struktur sosial tersebut, figur kyai dan ustaz lokal memainkan peran sentral sebagai penjaga legitimasi moral sekaligus pengarah kehidupan religius masyarakat. Tradisi kepemimpinan karismatik dalam Islam Indonesia telah lama diidentifikasi sebagai faktor penting dalam pembentukan otoritas keagamaan di tingkat akar rumput.⁵ Kerangka sosiologis mengenai otoritas karismatik menjelaskan bahwa kepemimpinan religius bertumpu pada kepercayaan kolektif terhadap kualitas personal dan pengalaman keilmuan seorang tokoh.⁶ Studi mutakhir bahkan menunjukkan bahwa transformasi dan negosiasi otoritas keagamaan di Indonesia terus berlangsung dalam berbagai bentuk, termasuk dalam institusi pendidikan dan ruang komunitas lokal.⁷ Hal ini menegaskan bahwa komunitas Muslim pedesaan merupakan ruang penting untuk memahami bagaimana otoritas agama dijalankan dan direproduksi.

Salah satu arena utama reproduksi otoritas tersebut adalah pendidikan Al-Qur'an nonformal yang berkembang secara berbasis komunitas. Pendidikan ini tumbuh melalui mekanisme sosial yang relatif otonom dari struktur negara dan sering kali beroperasi dalam konteks desentralisasi kelembagaan.⁸ Dinamika desentralisasi pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa otonomi lokal dapat memperkuat partisipasi komunitas, namun sekaligus membuka ruang bagi variasi dan ketimpangan antar-lembaga.⁹ Dalam konteks pendidikan Islam, proses tersebut tidak hanya menyangkut tata kelola administratif, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana otoritas religius dilembagakan dan dipraktikkan dalam kehidupan sosial komunitas Muslim pedesaan.¹⁰

Desentralisasi pendidikan di Indonesia merupakan bagian dari transformasi tata kelola pascareformasi yang memberikan ruang lebih luas bagi pemerintah daerah dan komunitas lokal dalam mengelola sektor pendidikan.¹¹

⁴ Carool Kersten, *Islam in Indonesia: The Contest for Society, Ideas and Values* (Oxford University Press, 2015).

⁵ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1982).

⁶ Max Weber, "Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology," ed. Edited by Guenther Roth & Claus Wittich (University of California Press, 1978).

⁷ Nicole R. Bus, "Programming the next Generation of Prenatal Programming of Stress Research: A Review and Suggestions for the Future of the Field," *Cambridge Journals* Volume 36, no. Issue 5: The Future of Development (2024).

⁸ Irsyad Zamjani, *The Politics of Educational Decentralisation in Indonesia A Quest for Legitimacy*, 2022, <https://doi.org/https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-16-6901-9>.

⁹ Masooda Bano and Daniel Dyonisius, "Community-Responsive Education Policies and the Question of Optimality : Decentralisation and District-Level Variation in Policy Adoption and Implementation in Indonesia," no. August (2022).

¹⁰ Moh Roqib, "Islamic Education in Indonesian Legal Framework : Policy Analysis and Implementation," *International Journal of Social Science And* 08, no. 07 (2025): 5474-78, <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i7-67>.

¹¹ Dwight Y. King, *Democratization and Decentralization in Post-Subarto Indonesia* (Leiden: Leiden: KITLV Press., 2003).

Proses ini tidak hanya berdampak pada pendidikan formal, tetapi juga pada pendidikan keagamaan yang berkembang di luar struktur sekolah negeri.¹² Dalam konteks pendidikan Islam, desentralisasi membuka peluang bagi aktor-aktor lokal untuk mengembangkan lembaga pendidikan berbasis komunitas sesuai kebutuhan sosial dan kultural masing-masing wilayah.¹³ Namun, perluasan otonomi tersebut juga menghadirkan tantangan koordinasi dan konsistensi standar di antara lembaga-lembaga yang tumbuh secara mandiri.¹⁴

Pendidikan Al-Qur'an nonformal, seperti Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dan madrasah diniyah, berkembang dalam lanskap desentralisasi tersebut dengan karakter yang sangat berbasis komunitas.¹⁵ Laporan statistik pendidikan diniyah menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga pendidikan Al-Qur'an berada di bawah pengelolaan masyarakat dan organisasi keagamaan, bukan sepenuhnya dalam kendali birokrasi negara. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pendidikan Al-Qur'an di Indonesia beroperasi dalam kerangka otonomi sosial yang kuat, di mana legitimasi kelembagaan bertumpu pada kepercayaan komunitas terhadap pengelola dan figur religius lokal.¹⁶

Di sisi lain, desentralisasi yang tinggi juga dapat memunculkan variasi kualitas, perbedaan kurikulum, dan fragmentasi pengelolaan antar-lembaga.¹⁷ Studi tentang kebijakan pendidikan Islam menunjukkan bahwa kurangnya mekanisme supervisi dan koordinasi dapat memperlebar kesenjangan mutu di tingkat lokal. Dalam konteks komunitas Muslim pedesaan, dinamika tersebut tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana otoritas keagamaan bekerja dalam menentukan arah pendidikan dan menjaga legitimasi institusi di tengah keberagaman praktik.¹⁸

Meskipun desentralisasi pendidikan telah membuka ruang partisipasi komunitas dalam pengelolaan lembaga keagamaan, dinamika tersebut juga memunculkan persoalan baru terkait legitimasi, koordinasi, dan konsistensi kelembagaan.¹⁹ Dalam konteks pendidikan Islam, otonomi lokal sering kali

¹² Zamjani, *The Politics of Educational Decentralisation in Indonesia A Quest for Legitimacy*, 2022.

¹³ Abd Wahid Hasyim, "Transforming Pesantren : Adaptive Strategies in the Context of Educational Decentralization in Indonesia," *Tadris: Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah* 9, no. 2 (2024): 459–73, <https://doi.org/10.24042/tadris.v9i2.19531>.

¹⁴ Gulab Khilji, Nazir Ahmed Jogezi, and Nadra Bibi, "Understanding the Effects of Educational Decentralization through the Perspectives of Education Managers and Teachers," 2022, <https://doi.org/10.1108/IJEM-05-2021-0181>.

¹⁵ Kemendikbudristek, "Policy Brief: Penguatan Ekosistem Pendidikan Non-Formal Di Daerah" (Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan, 2021), <https://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id>.

¹⁶ Robert W. Hefner, *Islam and Citizenship in Indonesia Democracy and the Quest for an Inclusive Public Ethics*.

¹⁷ Ika Sandra et al., "Managing and Supervising Privatization of Islamic Education within a Decentralized Educational System in West Sumatra," *Journal of Civic Education* 6, no. 1 (2023): 36–47, <https://doi.org/10.24036/jce.v6i1.963>.

¹⁸ Shane Joshua, "The Dangers of Decentralization : Clientelism , the State , & Nature in a Democratic Indonesia The Dangers of Decentralization," 2008.

¹⁹ Zamjani, *The Politics of Educational Decentralisation in Indonesia A Quest for Legitimacy*, 2022.

memperkuat peran aktor religius sebagai pengelola utama institusi pendidikan berbasis komunitas.²⁰ Namun, peningkatan peran tersebut tidak selalu diiringi dengan mekanisme tata kelola yang terstruktur, sehingga memunculkan variasi standar dan praktik antar-lembaga.²¹ Situasi ini menempatkan pendidikan Al-Qur'an nonformal sebagai arena penting untuk memahami bagaimana otoritas keagamaan bekerja dalam kondisi desentralisasi yang relatif longgar.

Sejumlah studi telah membahas relasi antara organisasi Islam dan otoritas religius dalam masyarakat Indonesia.²² Kajian lain menunjukkan bahwa transformasi otoritas keagamaan di Indonesia berlangsung dalam konteks kompetisi legitimasi dan perubahan sosial yang dinamis.²³ Namun, perhatian terhadap pendidikan Al-Qur'an nonformal sebagai ruang negosiasi otoritas di komunitas Muslim pedesaan masih relatif terbatas.²⁴ Sebagian besar penelitian cenderung memusatkan perhatian pada pendidikan formal, pesantren besar, atau kebijakan nasional, sementara dinamika otoritas dalam institusi pendidikan berbasis komunitas desa belum banyak dieksplorasi secara mendalam.

Dengan demikian, persoalan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana otoritas keagamaan dikonstruksi, dijalankan, dan dinegosiasikan dalam pendidikan Al-Qur'an nonformal yang terdesentralisasi di komunitas Muslim pedesaan Indonesia. Pertanyaan ini menjadi penting karena desentralisasi tidak hanya menyangkut distribusi kewenangan administratif, tetapi juga menyentuh dimensi legitimasi religius dan fragmentasi kelembagaan di tingkat lokal.²⁵ Memahami dinamika tersebut akan membantu menjelaskan bagaimana komunitas Muslim pedesaan mengelola keseimbangan antara otonomi lokal dan kebutuhan akan koordinasi institusional dalam kehidupan keagamaan sehari-hari.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana otoritas keagamaan bekerja dalam pendidikan Al-Qur'an nonformal yang berkembang secara terdesentralisasi di komunitas Muslim pedesaan Indonesia. Secara lebih spesifik, penelitian ini berupaya menjelaskan mekanisme legitimasi kyai dan ustaz sebagai figur otoritatif dalam pengelolaan lembaga pendidikan berbasis komunitas, serta mengkaji bagaimana desentralisasi memengaruhi struktur dan variasi kelembagaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memotret pendidikan Al-Qur'an sebagai praktik pedagogis, tetapi sebagai arena sosial

²⁰ Hasyim, "Transforming Pesantren: Adaptive Strategies in the Context of Educational Decentralization in Indonesia."

²¹ Sandra et al., "Managing and Supervising Privatization of Islamic Education within a Decentralized Educational System in West Sumatra."

²² Bus, "Programming the next Generation of Prenatal Programming of Stress Research: A Review and Suggestions for the Future of the Field."

²³ Ricklefs, "Rediscovering Islam in Javanese History."

²⁴ Robert W. Hefner, *Islam and Citizenship in Indonesia Democracy and the Quest for an Inclusive Public Ethics*.

²⁵ Joshua, "The Dangers of Decentralization: Clientelism, the State, & Nature in a Democratic Indonesia The Dangers of Decentralization."

tempat relasi otoritas dan legitimasi religius dibentuk dan dinegosiasikan. Pendekatan ini sejalan dengan kajian tentang pendidikan Islam dan otoritas religius yang menempatkan institusi pendidikan sebagai bagian dari dinamika sosial dan politik Islam kontemporer.²⁶

Secara ilmiah, artikel ini memberikan kontribusi pada studi Islamic Studies dengan memperluas pembacaan tentang otoritas keagamaan di luar kerangka institusi formal negara. Studi tentang otoritas Islam di Indonesia selama ini banyak berfokus pada organisasi besar atau dinamika nasional.²⁷ Sementara itu, penelitian ini menempatkan pendidikan Al-Qur'an nonformal sebagai ruang penting dalam reproduksi dan negosiasi otoritas religius di tingkat komunitas pedesaan. Selain itu, artikel ini juga memperkaya diskursus tentang desentralisasi pendidikan dengan menunjukkan bahwa desentralisasi tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga memengaruhi struktur legitimasi dan fragmentasi kelembagaan dalam pendidikan Islam.²⁸ Dengan demikian, penelitian ini menjembatani kajian tentang otoritas keagamaan, komunitas Muslim pedesaan, dan tata kelola pendidikan Islam dalam satu kerangka analitis yang terintegrasi.

Penelitian ini memiliki sejumlah batasan yang perlu ditegaskan. Pertama, studi ini berbasis pada satu kasus komunitas Muslim pedesaan di Jawa Timur, sehingga temuan yang diperoleh tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara statistik ke seluruh wilayah Indonesia. Kedua, fokus penelitian ini terbatas pada pendidikan Al-Qur'an nonformal dan tidak membahas pendidikan formal madrasah atau sekolah negeri secara mendalam. Ketiga, penelitian ini menitikberatkan pada analisis relasi otoritas dan kelembagaan, sehingga tidak mengkaji secara rinci aspek kurikulum atau metodologi pembelajaran. Dengan pembatasan tersebut, artikel ini diarahkan untuk memberikan pemahaman kontekstual tentang dinamika otoritas keagamaan dalam pendidikan berbasis komunitas, sebagaimana disarankan dalam pendekatan studi kasus kualitatif yang menekankan kedalaman analisis kontekstual.²⁹

PEMBAHASAN

Pembahasan berisi kajian teori, metodologi, Analisis, Hasil dan Diskusi. Berisi pula Sub-sub Bab Hasil Penelitian. Bab ini berisi temuan penelitian dan pembahasannya, kemudian temuan-temuan yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan

²⁶ Robert W. Hefner, *Islam and Citizenship in Indonesia Democracy and the Quest for an Inclusive Public Ethics*.

²⁷ Joshua, "The Dangers of Decentralization : Clientelism , the State , & Nature in a Democratic Indonesia The Dangers of Decentralization."

²⁸ Zamjani, *The Politics of Educational Decentralisation in Indonesia A Quest for Legitimacy*, 2022.

²⁹ Robert K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (SAGE Publications, Inc, 2017).

Pengantar Analitis: Kerangka Teoretis dan Posisi Metodologis

Untuk memahami dinamika pendidikan Al-Qur'an nonformal di komunitas Muslim pedesaan, artikel ini bertolak dari dua pijakan analitis utama konsep otoritas keagamaan dan kerangka desentralisasi pendidikan. Otoritas keagamaan dalam konteks Islam Indonesia tidak semata-mata bersumber dari struktur formal, melainkan dari pengakuan sosial dan transmisi keilmuan yang berakar pada relasi guru–murid serta reputasi moral di tengah komunitas.³⁰ Dalam tradisi pendidikan Islam Indonesia, pola transmisi tersebut membentuk apa yang sering disebut sebagai jaringan keilmuan (*scholarly networks*) yang menghubungkan figur lokal dengan otoritas yang lebih luas di tingkat regional maupun nasional.² Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi tidak berdiri secara individual, tetapi berlapis dan terhubung dalam mata rantai tradisi yang lebih panjang.³¹

Dalam perspektif sosiologi klasik, bentuk legitimasi semacam ini dapat dibaca sebagai otoritas karismatik yang memperoleh daya ikatnya dari pengakuan kolektif atas kapasitas personal seorang pemimpin.³² Namun dalam konteks Indonesia kontemporer, otoritas tersebut tidak berdiri di ruang hampa; ia terus dinegosiasikan dalam lanskap sosial-politik yang berubah, termasuk dalam ranah pendidikan Islam.³³ Sejumlah studi mutakhir menunjukkan bahwa otoritas Islam di Indonesia bergerak dalam spektrum yang luas, mulai dari institusionalisasi dalam pesantren besar hingga praktik relasional di tingkat komunitas.³⁴ Dalam konteks ini, pendidikan Al-Qur'an nonformal menjadi ruang penting untuk membaca bagaimana otoritas beroperasi di luar struktur organisasi besar dan di luar intervensi negara secara langsung.

Di sisi lain, pendidikan Al-Qur'an nonformal berkembang dalam kerangka desentralisasi yang memberikan ruang luas bagi aktor lokal untuk mengelola institusi keagamaan secara mandiri.³⁵ (King, 2003) Dinamika ini memperlihatkan bagaimana kebijakan desentralisasi tidak hanya berdampak pada administrasi pemerintahan, tetapi juga pada struktur legitimasi pendidikan

³⁰ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. (Jakarta: LP3ES, 2011).

³¹ "PESANTREN AND KITAB KUNING : MAINTENANCE AND CONTINUATION," 1994, 121–46.

³² Max Weber, *The Theory Of Economic And Social Organization*, Trans. AM Henderson and Talcott Parsons. New York:, 1947.

³³ Joshua, "The Dangers of Decentralization : Clientelism , the State , & Nature in a Democratic Indonesia The Dangers of Decentralization."

³⁴ Robert W. Hefner, *Islam and Citizenship in Indonesia Democracy and the Quest for an Inclusive Public Ethics*.

³⁵ King, *Democratization and Decentralization in Post-Subarto Indonesia*.

berbasis komunitas.³⁶ Dalam kajian politik desentralisasi pendidikan di Indonesia, Zamjani menegaskan bahwa desentralisasi bukan sekadar redistribusi kewenangan administratif, tetapi juga arena perebutan legitimasi dan pembentukan tata kelola baru di tingkat lokal.³⁷ Sejumlah kajian menunjukkan bahwa otonomi lokal dapat memperkuat partisipasi masyarakat, namun sekaligus membuka kemungkinan terjadinya variasi standar dan fragmentasi kelembagaan.³⁸ Bano dan Dyonisius menekankan bahwa kebijakan pendidikan berbasis komunitas sering kali menghasilkan responsivitas yang tinggi terhadap kebutuhan lokal, tetapi pada saat yang sama menciptakan diferensiasi implementasi yang sulit dikontrol secara sistemik.³⁹ Dalam konteks pendidikan Islam Indonesia, fenomena tersebut terlihat pada pertumbuhan lembaga-lembaga Al-Qur'an yang beroperasi secara independen dengan tingkat koordinasi yang terbatas.

Perbandingan dengan studi pesantren menunjukkan bahwa tingkat institusionalisasi sangat menentukan bentuk otoritas yang berkembang. Hefner mencatat bahwa pesantren modern cenderung mengalami birokratisasi karisma, sementara lembaga skala komunitas lebih mempertahankan bentuk otoritas yang bersifat relasional dan personal.⁴⁰ Temuan ini membantu menempatkan pendidikan Al-Qur'an nonformal dalam spektrum yang berbeda dari pesantren besar yang telah terintegrasi dalam sistem regulasi negara.⁴¹

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menangkap kompleksitas relasi antara otoritas keagamaan dan desentralisasi pendidikan dalam konteks kehidupan nyata. Pendekatan ini memungkinkan pembacaan yang lebih dekat terhadap pengalaman, praktik, dan narasi para aktor lokal yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an.⁴² Pendekatan semacam ini sejalan dengan tradisi interpretatif dalam studi Islam yang menekankan pentingnya memahami agama sebagai praktik sosial yang hidup dalam konteks lokal, bukan

³⁶ Irsyad Zamjani, *The Politics of Educational Decentralisation in Indonesia A Quest for Legitimacy*, 1st ed. (Palgrave Macmillan Singapore, 2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-981-16-6901-9>.

³⁷ Zamjani, *The Politics of Educational Decentralisation in Indonesia A Quest for Legitimacy*, 2022.

³⁸ Bano and Dyonisius, "Community-Responsive Education Policies and the Question of Optimality: Decentralisation and District-Level Variation in Policy Adoption and Implementation in Indonesia."

³⁹ Bano and Dyonisius.

⁴⁰ Robert W. Hefner, *Islam and Citizenship in Indonesia Democracy and the Quest for an Inclusive Public Ethics*.

⁴¹ Hasyim, "Transforming Pesantren: Adaptive Strategies in the Context of Educational Decentralization in Indonesia."

⁴² Cheryl N. Poth John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Among Five Approaches*, Fifth (SAGE Publications, Inc, 2024).

semata sebagai sistem normatif tekstual.⁴³ Desain studi kasus dipilih karena fokus penelitian bukan pada generalisasi statistik, melainkan pada pemahaman mendalam atas dinamika spesifik dalam satu komunitas yang representatif secara tipologis.⁴⁴

Penelitian dilaksanakan di sebuah desa Muslim pedesaan di Jawa Timur yang memiliki sejumlah lembaga pendidikan Al-Qur'an nonformal dengan karakter otonomi yang kuat. Data diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan kyai, ustaz, pengelola lembaga, wali santri, serta perangkat desa, dan ditunjang oleh analisis dokumen kelembagaan. Teknik wawancara semi-terstruktur digunakan untuk membuka ruang refleksi informan tanpa mengarahkan jawaban secara kaku.⁴⁵ Analisis dilakukan secara bertahap melalui proses reduksi, kategorisasi, dan penarikan makna, dengan memperhatikan konteks sosial yang melingkupi praktik pendidikan tersebut.⁴⁶ Untuk menjaga konsistensi dan keabsahan temuan, dilakukan triangulasi sumber dan metode guna memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan tidak bertumpu pada satu jenis data semata.⁴⁷

Dengan posisi teoretis dan metodologis tersebut, bagian berikut akan memaparkan temuan lapangan sekaligus mendiskusikannya dalam kerangka otoritas keagamaan dan desentralisasi pendidikan di komunitas Muslim pedesaan Indonesia.

Lanskap Pendidikan Al-Qur'an Nonformal di Komunitas Pedesaan

Temuan lapangan menunjukkan bahwa pendidikan Al-Qur'an nonformal di desa yang menjadi lokasi penelitian berkembang dalam struktur kelembagaan yang relatif padat untuk ukuran komunitas pedesaan. Pemetaan yang dilakukan selama penelitian mencatat sedikitnya sembilan lembaga aktif yang terdiri atas Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), madrasah diniyah, dan satu pesantren. Jumlah santri di masing-masing lembaga bervariasi, berkisar antara 30 hingga 80 peserta didik. Variasi ini tidak hanya menunjukkan perbedaan kapasitas kelembagaan, tetapi juga mengindikasikan tingkat kepercayaan masyarakat yang berbeda terhadap masing-masing pengelola.

⁴³ Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures: Selected Essays* (New York: Basic Books, 1973), <https://archive.org/details/interpretationof00geer>.

⁴⁴ Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*.

⁴⁵ James P. Spradley, *The Ethnographic Interview* (United State Of America: waveland press, Inc, 2016).

⁴⁶ Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru (Terjemahan)*, Penerbit Universitas Indonesia, 2007.

⁴⁷ Norman K. Denzin, *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*, 1st Editio, 2017.

Kepadatan lembaga semacam ini menunjukkan bahwa pendidikan Al-Qur'an di tingkat desa tidak dapat diposisikan sebagai aktivitas pinggiran, melainkan sebagai bagian dari infrastruktur sosial Islam yang hidup. Fenomena serupa juga dicatat dalam laporan statistik pendidikan diniyah dan pesantren nasional yang menunjukkan bahwa lembaga nonformal Al-Qur'an mengalami pertumbuhan signifikan dalam dua dekade terakhir.⁴⁸ Dalam kajian historisnya, Azra menegaskan bahwa pendidikan Islam di Indonesia memang berkembang melalui pola komunitarian yang lentur dan adaptif terhadap konteks lokal.⁴⁹ Pola ini menjelaskan mengapa lembaga kecil berbasis dusun dapat tumbuh tanpa harus terintegrasi dalam satu sistem administratif yang seragam

Sebaran lembaga tersebut tidak terkonsentrasi pada satu titik, melainkan tersebar di beberapa dusun. Pola penyelenggaraan pembelajaran menyesuaikan dengan ritme sosial masyarakat desa. Sebagian TPQ menyelenggarakan kegiatan pada sore hari, umumnya setelah jam sekolah formal berakhir, sementara sebagian lainnya berlangsung pada malam hari selepas salat Magrib hingga Isya. Pola waktu ini mencerminkan upaya adaptif lembaga terhadap aktivitas domestik dan pendidikan formal anak-anak. Pendidikan Al-Qur'an tidak ditempatkan sebagai kegiatan insidental, melainkan sebagai rutinitas terjadwal yang menjadi bagian dari keseharian keluarga Muslim desa.

Dari sisi pengelolaan, ditemukan variasi bentuk kelembagaan yang cukup mencolok. Beberapa TPQ beroperasi di ruang kelas madrasah atau fasilitas yang relatif terstruktur, sementara sebagian lainnya diselenggarakan di rumah ustaz atau musholla lingkungan. Pesantren yang ada berfungsi sebagai simpul otoritatif yang memiliki struktur lebih mapan, tetapi tidak secara administratif mengoordinasikan TPQ lain. Tidak ditemukan sistem kurikulum bersama atau forum koordinasi formal antar-lembaga. Setiap pengelola menyusun metode pembelajaran, standar evaluasi, dan pola kelulusan berdasarkan pengalaman belajar masing-masing serta rujukan kepada guru atau kyai sebelumnya. Dalam wawancara, beberapa ustaz menyatakan bahwa metode yang digunakan merupakan kelanjutan dari tradisi belajar yang mereka terima, bukan hasil kesepakatan kolektif antar-lembaga. Kondisi ini memperlihatkan bentuk reproduksi tradisi keilmuan berbasis transmisi personal, sebagaimana digambarkan oleh Dhofier dalam studi klasiknya tentang pesantren.⁵⁰ Namun

⁴⁸ Kementerian Agama RI, "Laporan Statistik Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Tahun 2022." (Jakarta, 2022).

⁴⁹ Azyumardi Azra, *Surau: Pendidikan Islam Tradisional Dalam Transisi Dan Modernisasi*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu., 2003).

⁵⁰ Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*.

berbeda dengan pesantren besar yang mengalami proses institusionalisasi karisma, lembaga-lembaga Al-Qur'an skala desa cenderung mempertahankan struktur yang lebih cair dan berbasis relasi langsung. Dalam konteks ini, keberagaman metode bukan semata hasil ketidakteraturan, melainkan konsekuensi dari pola pewarisan pengetahuan yang terdesentralisasi.

Struktur semacam ini memperlihatkan bahwa pendidikan Al-Qur'an nonformal di desa tersebut tumbuh melalui mekanisme desentralisasi berbasis komunitas. Otonomi kelembagaan menjadi ciri utama: pendirian, pengelolaan, dan keberlanjutan lembaga sepenuhnya bergantung pada inisiatif lokal serta dukungan sosial masyarakat. Fenomena ini sejalan dengan dinamika desentralisasi pendidikan di Indonesia yang membuka ruang luas bagi aktor lokal dalam mengelola institusi pendidikan sesuai konteks sosialnya.⁵¹ Dalam analisis politik desentralisasi pendidikan, Zamjani menunjukkan bahwa redistribusi kewenangan ke tingkat lokal sering kali menghasilkan konfigurasi tata kelola yang beragam dan tidak seragam antar-wilayah. Bano dan Dyonisius juga menekankan bahwa responsivitas lokal yang tinggi dalam sistem desentralisasi sering kali berjalan beriringan dengan diferensiasi standar implementasi.⁵² Temuan di desa ini mengafirmasi dinamika tersebut dalam skala mikro: setiap lembaga memiliki otonomi penuh tanpa mekanisme standardisasi bersama.

Namun, otonomi tersebut tidak diikuti oleh sistem integratif formal yang menghubungkan antar-lembaga secara struktural. Ketidadaan koordinasi ini tidak dipersepsi sebagai masalah mendesak oleh para pengelola, tetapi secara analitis menunjukkan pola fragmentasi kelembagaan yang inheren dalam model pengelolaan berbasis komunitas.⁵³ Fragmentasi ini dapat dipahami sebagai konsekuensi struktural dari desentralisasi, bukan semata sebagai kelemahan manajerial. Dalam kajian internasional tentang desentralisasi pendidikan, variasi mutu dan lemahnya koordinasi sering muncul ketika tidak terdapat mekanisme pengawasan atau akuntabilitas horizontal. Dengan demikian, pola yang ditemukan di desa penelitian bukan fenomena anomali, melainkan bagian dari logika struktural desentralisasi itu sendiri.

Dalam konteks desa, keberadaan sembilan lembaga Al-Qur'an nonformal dengan ratusan santri aktif menjadikan pendidikan Qur'ani sebagai infrastruktur sosial-keagamaan yang signifikan. Lembaga-lembaga tersebut tidak hanya berfungsi sebagai ruang belajar membaca Al-Qur'an, tetapi juga sebagai

⁵¹ King, *Democratization and Decentralization in Post-Subarto Indonesia*.

⁵² Bano and Dyonisius, "Community-Responsive Education Policies and the Question of Optimality: Decentralisation and District-Level Variation in Policy Adoption and Implementation in Indonesia."

⁵³ Bano and Dyonisius.

ruang pembentukan identitas religius, disiplin sosial, dan jaringan relasi antar-keluarga. Hefner menekankan bahwa pendidikan Islam di Indonesia memainkan peran sentral dalam membentuk etos kewargaan dan kesalehan publik.⁵⁴ Pada skala komunitas pedesaan, fungsi tersebut terwujud dalam bentuk yang lebih intim: TPQ menjadi ruang di mana anak-anak tidak hanya belajar membaca Al-Qur'an, tetapi juga belajar tentang adab, hierarki sosial, dan relasi otoritas religius. Dengan demikian, lanskap pendidikan Al-Qur'an nonformal ini memperlihatkan bahwa pendidikan bukan sekadar sektor layanan, melainkan bagian dari tata kelola moral komunitas.

Dengan demikian, lanskap pendidikan Al-Qur'an nonformal di komunitas pedesaan ini memperlihatkan dua wajah sekaligus: di satu sisi ia menunjukkan vitalitas dan partisipasi masyarakat yang tinggi; di sisi lain ia menampilkan pola otonomi yang berpotensi melahirkan variasi standar dan diferensiasi kelembagaan. Bagian berikut akan memperdalam bagaimana dalam struktur yang terdesentralisasi ini, otoritas keagamaan dikonstruksi dan dijalankan oleh kyai serta ustaz sebagai aktor sentral di tingkat lokal.

Kyai dan Ustaz sebagai Otoritas Keagamaan Lokal

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa keberlangsungan pendidikan Al-Qur'an nonformal di desa ini sangat bergantung pada figur kyai dan ustaz sebagai pusat legitimasi religius. Otoritas mereka tidak dibentuk melalui mekanisme sertifikasi formal atau penunjukan administratif, melainkan melalui proses pengakuan sosial yang berlangsung secara gradual di dalam komunitas. Dalam wawancara, para pengelola lembaga menegaskan bahwa legitimasi mereka berakar pada pengalaman belajar sebelumnya “dulu saya mondok di bawah bimbingan kyai tertentu” yang menjadi sumber otoritatif dalam membangun kepercayaan masyarakat. Narasi semacam ini menunjukkan bahwa pengalaman menuntut ilmu berfungsi sebagai modal simbolik yang menghubungkan individu dengan jaringan transmisi keilmuan yang lebih luas.

Selain pengalaman belajar, jaringan guru (sanad keilmuan) menjadi elemen penting dalam konstruksi legitimasi. Para ustaz sering menyebut nama kyai atau pesantren tempat mereka belajar sebagai rujukan moral dan epistemik. Penyebutan tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan mekanisme untuk menegaskan kontinuitas tradisi keilmuan. Dalam konteks ini, otoritas tidak berdiri secara individual, tetapi berakar pada relasi genealogis intelektual yang diakui oleh komunitas. Tradisi semacam ini telah lama dicatat sebagai ciri khas

⁵⁴ Robert W. Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia* (Princeton University Press, 2000).

pendidikan Islam Indonesia, di mana jaringan guru-murid menjadi fondasi transmisi otoritas keagamaan.⁵⁵

Reputasi moral juga menjadi unsur sentral dalam pembentukan otoritas lokal. Beberapa informan menyatakan bahwa seorang ustaz dihormati bukan hanya karena pengetahuan agama, tetapi karena keteladanan perilaku, kedisiplinan ibadah, serta keterlibatan dalam kegiatan sosial desa. Dengan kata lain, otoritas dibangun melalui konsistensi praksis religius yang dapat diamati sehari-hari. Hal ini memperlihatkan bahwa legitimasi religius di tingkat pedesaan bersifat performatif: ia harus terus diperlihatkan dan dijaga melalui tindakan sosial yang selaras dengan nilai yang diajarkan. Pengakuan sosial inilah yang pada akhirnya menempatkan kyai dan ustaz sebagai rujukan utama dalam persoalan keagamaan, baik di ruang pendidikan maupun di luar kelas.

Peran mereka pun melampaui fungsi pedagogis. Kyai dan ustaz terlibat dalam ritual keagamaan, memimpin doa pada acara keluarga, memberikan nasihat moral kepada remaja, hingga menjadi mediator dalam persoalan sosial warga. Dalam konteks ini, lembaga pendidikan Al-Qur'an tidak terpisah dari kehidupan sosial desa; ia justru menjadi salah satu ruang artikulasi otoritas yang lebih luas. Keterlibatan ini memperkuat posisi kyai sebagai figur sentral yang menjembatani dimensi spiritual, sosial, dan pendidikan secara bersamaan.

Menariknya, meskipun terdapat beberapa lembaga dan figur religius di desa tersebut, tidak ditemukan kompetisi terbuka antar-otoritas. Perbedaan metode pembelajaran atau pendekatan keagamaan jarang diperdebatkan secara publik. Dalam wawancara, para ustaz menyatakan bahwa “selama tujuannya sama, yaitu mengajarkan Al-Qur'an, tidak perlu dipersoalkan perbedaannya.” Sikap ini menunjukkan bahwa harmoni sosial lebih diutamakan daripada klaim kebenaran yang eksklusif. Otoritas di sini tidak dipraktikkan dalam bentuk dominasi yang konfrontatif, melainkan dalam kerangka relasional yang menjaga kohesi komunitas.

Secara analitis, pola tersebut dapat dibaca melalui konsep otoritas karismatik Max Weber, yang menekankan bahwa legitimasi muncul dari pengakuan kolektif terhadap kualitas personal seorang pemimpin.⁵⁶ Namun dalam konteks desa ini, karisma tidak berdiri sebagai fenomena spontan, melainkan direproduksi melalui praktik sosial dan jaringan keilmuan yang berkelanjutan. Eisenstadt menyebut proses ini sebagai institusionalisasi karisma, yakni bagaimana legitimasi personal secara bertahap memperoleh bentuk sosial yang lebih stabil.⁵⁷ Dalam kasus pendidikan Al-Qur'an nonformal, proses reproduksi tersebut terlihat dalam keberlanjutan lembaga yang tetap bertumpu pada figur tertentu sekaligus diterima oleh komunitas secara luas.

Dalam skala yang lebih luas, dinamika ini juga dapat dipahami dalam kerangka politik otoritas Islam di Indonesia. Bush menekankan bahwa otoritas

⁵⁵ Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*.

⁵⁶ Weber, “Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology.”

⁵⁷ S. N. Eisenstadt, *Max Weber: On Charisma and Institution Building* (University of Chicago Press., 1968).

religius selalu berada dalam ruang negosiasi antara tradisi, komunitas, dan perubahan sosial.⁵⁸ Hefner menunjukkan bahwa pendidikan Islam merupakan salah satu arena utama dalam kontestasi dan reproduksi otoritas di Indonesia kontemporer.⁵⁹ Meski pada tingkat desa tidak tampak kontestasi terbuka, struktur otonomi yang ada sebenarnya membuka ruang bagi pluralitas otoritas yang berjalan berdampingan. Dalam konteks ini, apa yang tampak sebagai harmoni sosial juga menyimpan potensi diferensiasi otoritas yang bersifat laten.

Lebih jauh, relasi antara kyai dan masyarakat dapat dibaca melalui pendekatan *relational authority*. Pepinsky dan kolega menekankan bahwa otoritas religius di Indonesia tidak semata bertumpu pada struktur formal, tetapi dibangun melalui jaringan hubungan interpersonal dan patronase sosial.⁶⁰ Dalam temuan lapangan, legitimasi ustaz sangat bergantung pada kedekatan personal dengan keluarga santri dan partisipasi dalam kehidupan sosial desa. Otoritas bukan sesuatu yang dipaksakan, melainkan tumbuh dari relasi kepercayaan yang berulang dan teruji dalam praktik sehari-hari.

Dengan demikian, konstruksi dan pelaksanaan otoritas keagamaan dalam pendidikan Al-Qur'an nonformal di komunitas pedesaan ini memperlihatkan karakter yang bersifat relasional, karismatik, dan berbasis jaringan tradisi. Otoritas tidak dihasilkan oleh struktur negara atau regulasi formal, tetapi oleh interaksi sosial yang terus menerus antara figur religius dan komunitasnya. Temuan ini menjawab tujuan penelitian pertama, yakni menjelaskan bagaimana otoritas keagamaan dikonstruksi dan dijalankan dalam konteks pendidikan yang terdesentralisasi. Dalam struktur yang otonom tersebut, legitimasi bukan sekadar soal siapa yang paling berilmu, tetapi siapa yang paling dipercaya dan diakui sebagai penjaga nilai religius di tengah kehidupan sosial desa.

Desentralisasi dan Fragmentasi Kelembagaan

Temuan lapangan menunjukkan bahwa otonomi lembaga pendidikan Al-Qur'an nonformal di desa penelitian berimplikasi langsung pada variasi metode pembelajaran dan standar kelembagaan. Dalam praktiknya, masing-masing TPQ dan madrasah diniyah menggunakan pendekatan yang berbeda dalam mengajarkan membaca Al-Qur'an. Sebagian menggunakan metode tradisional berbasis talaqqi dan pengulangan individual, sementara yang lain mengadopsi metode yang lebih terstruktur dengan buku panduan tertentu. Perbedaan ini tidak lahir dari kebijakan kolektif atau forum musyawarah antar-pengelola, melainkan dari pengalaman personal ustaz yang mengelola lembaga tersebut.

⁵⁸ Bus, "Programming the next Generation of Prenatal Programming of Stress Research: A Review and Suggestions for the Future of the Field."

⁵⁹ Robert W. Hefner, *Islam and Citizenship in Indonesia Democracy and the Quest for an Inclusive Public Ethics*.

⁶⁰ Joshua, "The Dangers of Decentralization: Clientelism, the State, & Nature in a Democratic Indonesia The Dangers of Decentralization."

Variasi juga tampak pada standar kelulusan santri. Tidak ditemukan indikator evaluasi yang seragam mengenai kelayakan seorang santri dinyatakan “lulus”. Dalam beberapa kasus, kelulusan ditentukan berdasarkan kemampuan membaca secara lancar tanpa banyak kesalahan tajwid; di tempat lain, kriteria tersebut lebih longgar dan bergantung pada penilaian subjektif pengajar. Ketika ditanya mengenai standar bersama, sebagian besar pengelola menyatakan bahwa tidak ada pedoman baku yang disepakati di tingkat desa. Setiap lembaga merasa memiliki kewenangan penuh untuk menentukan standar sesuai kapasitas dan pertimbangan masing-masing.

Ketiadaan regulasi desa yang secara khusus mengatur pendidikan Al-Qur’an nonformal semakin mempertegas karakter otonomi tersebut. Meskipun pemerintah desa memiliki perhatian terhadap kegiatan keagamaan, tidak terdapat peraturan atau kebijakan formal yang menetapkan standar minimal pengelolaan TPQ. Koordinasi antar-lembaga pun bersifat informal dan insidental, biasanya terjadi dalam forum keagamaan umum, bukan dalam kerangka tata kelola pendidikan yang terstruktur. Situasi ini menunjukkan bahwa struktur kelembagaan pendidikan Al-Qur’an di desa tersebut berkembang melalui mekanisme sosial, bukan melalui desain administratif yang terintegrasi.

Secara analitis, temuan ini dapat dipahami sebagai konsekuensi dari model desentralisasi yang memberi ruang luas bagi aktor lokal untuk menentukan arah pengelolaan pendidikan. Desentralisasi pendidikan di Indonesia memang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan responsivitas terhadap kebutuhan lokal.⁶¹ Namun, sebagaimana dicatat dalam kajian tentang politik desentralisasi pendidikan, otonomi yang tidak diimbangi dengan mekanisme koordinasi dapat menghasilkan variasi standar dan kesenjangan mutu antar-lembaga.⁶² Bano dan Dyonisius menunjukkan bahwa desentralisasi yang berbasis komunitas sering kali memperkuat inisiatif lokal, tetapi pada saat yang sama memunculkan diferensiasi kebijakan dan implementasi di tingkat akar rumput.⁶³

Dalam konteks pendidikan Al-Qur’an nonformal di desa ini, fragmentasi tidak muncul sebagai konflik terbuka, melainkan sebagai diferensiasi yang berjalan paralel. Setiap lembaga beroperasi dalam ruang otonomnya masing-masing tanpa merasa perlu untuk menyatukan standar. Fragmentasi tersebut bukan hasil kompetisi ideologis, melainkan konsekuensi struktural dari ketiadaan sistem integratif formal. Dengan kata lain, desentralisasi di sini memperkuat kemandirian, tetapi sekaligus melemahkan konsistensi kelembagaan.

Ketimpangan standar yang muncul tidak selalu disadari sebagai masalah oleh para pengelola. Selama lembaga tetap berjalan dan santri tetap datang,

⁶¹ King, *Democratization and Decentralization in Post-Subarto Indonesia*.

⁶² Zamjani, *The Politics of Educational Decentralisation in Indonesia A Quest for Legitimacy*, 2022.

⁶³ Bano and Dyonisius, “Community-Responsive Education Policies and the Question of Optimality: Decentralisation and District-Level Variation in Policy Adoption and Implementation in Indonesia.”

variasi metode dan evaluasi dianggap sebagai bagian dari dinamika lokal. Namun, dari sudut pandang tata kelola pendidikan, kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan kualitas hasil pembelajaran antar-lembaga. Studi mengenai pengelolaan pendidikan Islam dalam sistem terdesentralisasi menunjukkan bahwa tanpa mekanisme supervisi atau standar minimal bersama, kualitas layanan pendidikan cenderung bergantung pada kapasitas individu pengelola.⁶⁴ Dalam konteks ini, kualitas pendidikan Al-Qur'an sangat dipengaruhi oleh kompetensi dan komitmen ustaz yang memimpin masing-masing lembaga.

Dengan demikian, desentralisasi tidak hanya memengaruhi aspek administratif, tetapi juga membentuk struktur dan pola hubungan antar-lembaga pendidikan Al-Qur'an. Otonomi yang luas menghasilkan keberagaman metode dan pendekatan, tetapi juga menciptakan fragmentasi kelembagaan yang bersifat laten. Temuan ini secara langsung menjawab tujuan penelitian kedua, yakni menjelaskan bagaimana desentralisasi memengaruhi struktur kelembagaan pendidikan Al-Qur'an nonformal. Dalam komunitas pedesaan yang diteliti, desentralisasi memperkuat partisipasi lokal dan kemandirian aktor keagamaan, tetapi sekaligus menghasilkan sistem yang terfragmentasi, dengan standar dan praktik yang tidak seragam.

Negosiasi Otoritas dalam Kehidupan Keagamaan Sehari-hari

Jika pada bagian sebelumnya terlihat adanya variasi metode dan fragmentasi kelembagaan, temuan lapangan menunjukkan bahwa kondisi tersebut tidak berkembang menjadi konflik terbuka antar-aktor keagamaan. Perbedaan pendekatan pembelajaran, standar kelulusan, maupun gaya kepemimpinan tidak diperdebatkan secara publik. Dalam wawancara, beberapa ustaz menyatakan bahwa selama tujuan utama adalah mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anak, variasi metode bukanlah persoalan yang perlu dipersoalkan. Pernyataan ini mencerminkan adanya kesadaran kolektif untuk menjaga stabilitas sosial di atas perbedaan teknis atau interpretatif.

Harmoni sosial tampak menjadi nilai yang dijaga bersama. Tidak ditemukan upaya saling mengoreksi secara terbuka antar-lembaga, bahkan ketika terdapat perbedaan pendekatan yang cukup jelas. Dalam praktiknya, masyarakat pun tidak menempatkan lembaga-lembaga tersebut dalam posisi kompetitif. Orang tua memilih TPQ bagi anaknya lebih berdasarkan kedekatan geografis, hubungan personal dengan pengajar, atau rekomendasi keluarga, bukan atas dasar klaim superioritas metode. Situasi ini memperlihatkan bahwa legitimasi lembaga dan figur religius tidak ditentukan oleh standar objektif yang terukur, melainkan oleh kepercayaan interpersonal yang telah terbangun dalam relasi sosial sehari-hari.

Legitimasi yang berbasis relasi personal ini menjadi kunci dalam memahami bagaimana otoritas dijalankan. Kyai dan ustaz tidak hanya diakui karena kapasitas keilmuan, tetapi karena kedekatan mereka dengan keluarga santri, keterlibatan dalam kegiatan sosial, serta kehadiran mereka dalam momen-momen penting komunitas. Dalam konteks ini, otoritas bekerja secara relasional ia tumbuh dan dipertahankan

⁶⁴ Sandra et al., "Managing and Supervising Privatization of Islamic Education within a Decentralized Educational System in West Sumatra."

melalui jaringan hubungan sosial yang terus diperbarui. Pola ini memperlihatkan bahwa stabilitas sistem pendidikan Al-Qur'an nonformal tidak bergantung pada regulasi formal, tetapi pada jaringan kepercayaan yang terpelihara.

Secara analitis, dinamika tersebut dapat dipahami melalui pendekatan yang melihat Islam sebagai praktik sosial yang hidup dalam keseharian komunitas. Studi tentang Islam di Indonesia menekankan bahwa praktik keagamaan sering kali berakar pada keseimbangan antara normativitas teks dan kebutuhan menjaga kohesi sosial.⁶⁵ Dalam konteks desa, agama tidak hanya menjadi sistem keyakinan, tetapi juga mekanisme pengatur relasi sosial. Oleh karena itu, perbedaan tidak diarahkan menjadi arena kontestasi terbuka, melainkan dinegosiasikan secara diam-diam melalui penyesuaian dan toleransi praktis.

Konsep otoritas relasional juga membantu menjelaskan fenomena ini. Pepinsky dan kolega menunjukkan bahwa otoritas religius di Indonesia kerap beroperasi melalui jaringan hubungan sosial dan patronase yang fleksibel, bukan melalui struktur hierarkis formal.⁶⁶ Dalam temuan penelitian ini, otoritas kyai dan ustaz tidak dijalankan dalam bentuk klaim dominasi atas lembaga lain, melainkan dalam bentuk pengaruh yang diterima secara sukarela oleh komunitas. Pengaruh tersebut bersifat kontekstual dan bergantung pada keberlanjutan relasi sosial yang harmonis.

Komunitas desa sendiri berfungsi sebagai mediator potensial atas kemungkinan konflik. Norma sosial yang menekankan rukun dan kebersamaan menjadi mekanisme informal yang membatasi eskalasi perbedaan. Dengan demikian, fragmentasi kelembagaan yang telah diidentifikasi sebelumnya tidak otomatis menghasilkan perpecahan sosial. Sebaliknya, fragmentasi tersebut dinegosiasikan melalui budaya komunikasi yang menghindari konfrontasi langsung. Dalam konteks ini, stabilitas bukan dihasilkan oleh integrasi struktural, melainkan oleh keseimbangan relasional yang dijaga bersama.

Sintesis dan Diskusi Kritis

Empat bagian sebelumnya memperlihatkan bahwa pendidikan Al-Qur'an nonformal di komunitas pedesaan tidak dapat dipahami semata sebagai aktivitas pedagogis, melainkan sebagai arena produksi dan reproduksi otoritas keagamaan dalam kerangka desentralisasi. Lanskap kelembagaan yang padat menunjukkan vitalitas partisipasi masyarakat dalam menjaga transmisi nilai Qur'ani. Namun, kepadatan tersebut tidak dibangun melalui sistem integratif formal, melainkan melalui otonomi lembaga yang bertumpu pada figur kyai dan ustaz sebagai pusat legitimasi.

Temuan mengenai konstruksi otoritas memperlihatkan bahwa legitimasi religius di tingkat desa bersifat relasional dan berakar pada jaringan transmisi keilmuan, reputasi moral, serta pengakuan sosial. Otoritas tidak diproduksi melalui mekanisme birokratis, tetapi melalui interaksi sosial yang berulang dan terpelihara. Dalam konteks ini, desentralisasi memperkuat posisi aktor lokal sebagai pengelola utama pendidikan keagamaan. Namun, pada saat yang sama,

⁶⁵ Ricklefs, "Rediscovering Islam in Javanese History."

⁶⁶ Joshua, "The Dangers of Decentralization: Clientelism, the State, & Nature in a Democratic Indonesia The Dangers of Decentralization."

otonomi tersebut menciptakan diferensiasi metode dan standar yang tidak terkoordinasi secara sistemik.

Fragmentasi kelembagaan yang muncul bukanlah bentuk konflik terbuka, melainkan konsekuensi struktural dari model pengelolaan berbasis komunitas. Ketiadaan regulasi desa dan lemahnya koordinasi antar-lembaga tidak dipersepsi sebagai ancaman langsung terhadap stabilitas sosial, karena harmoni komunitas menjadi nilai yang lebih diutamakan daripada penyeragaman standar. Dengan demikian, sistem yang terfragmentasi tetap dapat bertahan karena ditopang oleh jaringan kepercayaan interpersonal dan budaya sosial yang menghindari konfrontasi.

Secara konseptual, temuan ini memperlihatkan bahwa desentralisasi pendidikan Al-Qur'an di komunitas Muslim pedesaan menghasilkan model tata kelola yang bersifat adaptif namun tidak terintegrasi. Otoritas keagamaan berfungsi sebagai simpul pengikat yang menjaga kohesi sistem meskipun tanpa struktur koordinatif formal. Dalam perspektif yang lebih luas, pendidikan Al-Qur'an nonformal dapat dipahami sebagai ruang di mana relasi antara agama, komunitas, dan kebijakan desentralisasi bertemu dan dinegosiasikan secara praktis.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh desentralisasi terhadap struktur kelembagaan tidak hanya terletak pada aspek administratif, tetapi juga pada cara otoritas religius dikonstruksi dan dijalankan. Otonomi lokal memperkuat partisipasi dan kedekatan sosial, tetapi juga membuka ruang bagi variasi standar yang berpotensi menghasilkan ketimpangan kualitas. Di titik inilah diskursus tentang pendidikan Islam di Indonesia perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kemandirian komunitas dan kebutuhan akan kerangka koordinasi yang lebih sistematis.

Sintesis ini menegaskan bahwa pendidikan Al-Qur'an nonformal di komunitas pedesaan Indonesia bukan sekadar fenomena lokal, melainkan cerminan dari dinamika yang lebih luas mengenai bagaimana agama, otoritas, dan kebijakan desentralisasi saling berkelindan dalam kehidupan sosial kontemporer. Bagian berikut akan merumuskan kesimpulan utama dari temuan-temuan tersebut.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan Al-Qur'an nonformal di komunitas Muslim pedesaan bukan sekadar ruang pedagogis untuk mengajarkan baca tulis Al-Qur'an, melainkan arena utama praktik dan reproduksi otoritas keagamaan. Lanskap kelembagaan yang padat, dengan beragam TPQ dan madrasah diniyah yang beroperasi secara mandiri, memperlihatkan vitalitas partisipasi masyarakat dalam menjaga transmisi nilai-nilai religius. Dalam

struktur yang terdesentralisasi tersebut, legitimasi kyai dan ustaz dibangun melalui pengalaman belajar, jaringan keilmuan, reputasi moral, serta pengakuan sosial yang tertanam dalam relasi interpersonal. Otoritas tidak diproduksi melalui mekanisme administratif formal, tetapi melalui kepercayaan yang terus direproduksi dalam praktik sosial sehari-hari.

Temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa desentralisasi pendidikan Al-Qur'an menghasilkan dua konsekuensi sekaligus. Di satu sisi, ia memberikan fleksibilitas dan ruang adaptasi bagi komunitas untuk mengelola lembaga sesuai kebutuhan lokal. Di sisi lain, otonomi tersebut melahirkan fragmentasi kelembagaan yang tercermin dalam variasi metode pembelajaran, perbedaan standar kelulusan, serta lemahnya koordinasi antar-lembaga. Fragmentasi ini tidak berkembang menjadi konflik terbuka karena ditopang oleh budaya harmoni dan mekanisme relasional yang menjaga stabilitas sosial desa. Dengan demikian, desentralisasi membentuk struktur kelembagaan yang adaptif namun tidak terintegrasi secara sistemik.

Secara akademik, artikel ini berkontribusi pada pengembangan studi Islamic Studies dengan memperluas pembahasan tentang otoritas keagamaan ke level komunitas Muslim pedesaan. Selama ini, diskursus mengenai otoritas Islam di Indonesia lebih banyak terfokus pada organisasi besar, lembaga formal, atau arena politik nasional. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan Al-Qur'an nonformal di tingkat desa merupakan ruang strategis untuk memahami bagaimana otoritas dikonstruksi, dinegosiasikan, dan dijalankan dalam praktik sosial konkret. Selain itu, artikel ini menegaskan pentingnya melihat pendidikan sebagai praktik sosial Islam yang tidak terpisah dari relasi kekuasaan, legitimasi, dan tata kelola komunitas.

Implikasi dari temuan ini menegaskan perlunya membaca dinamika Islam di Indonesia tidak hanya melalui institusi negara atau kebijakan formal, tetapi juga melalui praktik sosial yang hidup di tingkat akar rumput. Pendidikan Al-Qur'an nonformal perlu dipahami sebagai bagian dari tata kelola keagamaan lokal yang memiliki logika dan mekanisme legitimasi tersendiri. Upaya penguatan mutu atau koordinasi kelembagaan hendaknya mempertimbangkan karakter relasional otoritas lokal agar tidak mengganggu keseimbangan sosial yang telah terbangun.

Pada akhirnya, artikel ini menegaskan bahwa otoritas keagamaan dalam komunitas Muslim pedesaan Indonesia tidak hanya bekerja melalui institusi formal, tetapi melalui praktik sosial dan relasi kepercayaan yang hidup dalam keseharian pendidikan Al-Qur'an. Di dalam ruang-ruang sederhana tersebut, agama, otoritas, dan komunitas saling berkelindan membentuk tata kehidupan yang terus dinegosiasikan secara dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi. *Surau: Pendidikan Islam Tradisional Dalam Transisi Dan Modernisasi*. Jakarta,: Logos Wacana Ilmu., 2003.
- Bano, Masooda, and Daniel Dyonisius. "Community-Responsive Education Policies and the Question of Optimality : Decentralisation and District-Level Variation in Policy Adoption and Implementation in Indonesia," no. August (2022).
- Bus, Nicole R. "Programming the next Generation of Prenatal Programming of Stress Research: A Review and Suggestions for the Future of the Field." *Cambridge Journals* Volume 36, no. Issue 5: The Future of Development (2024).
- Denzin, Norman K. *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. 1st Editio., 2017.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2011.
- . *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1982.
- Eisenstadt, S. N. *Max Weber: On Charisma and Institution Building*. University of Chicago Press., 1968.
- Geertz, Clifford. *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. New York: Basic Books, 1973. <https://archive.org/details/interpretationof00geer>.
- Hasyim, Abd Wahid. "Transforming Pesantren : Adaptive Strategies in the Context of Educational Decentralization in Indonesia." *Tadris: Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah* 9, no. 2 (2024): 459–73. <https://doi.org/10.24042/tadris.v9i2.19531>.
- Hefner, Robert W. *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princenton University Press, 2000.
- John W. Creswell, Cheryl N. Poth. *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Among Five Approaches*. Fifth. SAGE Publications, Inc, 2024.
- Joshua, Shane. "The Dangers of Decentralization : Clientelism , the State , & Nature in a Democratic Indonesia The Dangers of Decentralization," 2008.
- Kemendikbudristek. "Policy Brief: Penguatan Ekosistem Pendidikan Non-Formal Di Daerah." Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan, 2021. <https://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id>.
- Kersten, Carool. *Islam in Indonesia: The Contest for Society, Ideas and Values*. Oxford University Press, 2015.
- Khilji, Gulab, Nazir Ahmed Jomezai, and Nadra Bibi. "Understanding the Effects of Educational Decentralization through the Perspectives of Education Managers and Teachers," 2022. <https://doi.org/10.1108/IJEM-05-2021-0181>.
- King, Dwight Y. *Democratization and Decentralization in Post-Subarto Indonesia*. Leiden: Leiden: KITLV Press., 2003.

- Liddle, Saiful Mujani and R. William. "Muslim Indonesia's Secular Democracy." *Asian Survey* Vol. 49, N (2009): 575–90. <https://doi.org/10.1525/as.2009.49.4.575><https://www.jstor.org/stable/10.1525/as.2009.49.4.575>.
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru (Terjemahan)*. Penerbit Universitas Indonesia, 2007.
- "Pesantren And Kitab Kuning : Maintenance And Continuation," 1994, 121–46.
- RI, Kementerian Agama. "Laporan Statistik Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Tahun 2022." Jakarta, 2022.
- Ricklefs, M C. "Rediscovering Islam in Javanese History" 3, no. August 2014 (2023). <https://doi.org/10.1163/9789004678897>.
- Robert W. Hefner. *Islam and Citizenship in Indonesia Democracy and the Quest for an Inclusive Public Ethics*. 1st Editio. London: Routledge, 2023. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781032629155>.
- Roqib, Moh. "Islamic Education in Indonesian Legal Framework : Policy Analysis and Implementation." *International Journal of Social Science And* 08, no. 07 (2025): 5474–78. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i7-67>.
- Sandra, Ika, Tiok Wijanarko, Nguyen Thi Hong Hanh, and Evelynd Evelynd. "Managing and Supervising Privatization of Islamic Education within a Decentralized Educational System in West Sumatra." *Journal of Civic Education* 6, no. 1 (2023): 36–47. <https://doi.org/10.24036/jce.v6i1.963>.
- Spradley, James P. *The Ethnographic Interview*. United State Of America: waveland press, Inc, 2016.
- Weber, Max. "Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology." edited by Edited by Guenther Roth & Claus Wittich. University of California Press, 1978.
- . *The Theory Of Economic And Social Organization*. Trans. AM Henderson and Talcott Parsons. New York:, 1947.
- Yin, Robert K. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. SAGE Publications, Inc, 2017.
- Zamjani, Irsyad. *The Politics of Educational Decentralisation in Indonesia A Quest for Legitimacy*, 2022. <https://doi.org/https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-16-6901-9>.
- . *The Politics of Educational Decentralisation in Indonesia A Quest for Legitimacy*. 1st ed. Palgrave Macmillan Singapore, 2022. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-981-16-6901-9>.